

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI
PENCEMARAN AIR PADA PDAM KOTA SURABAYA**

**(Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang
terjadi di kali Surabaya)**

SKRIPSI



Oleh :

JEFFRY HASIHOLAN SILALAH

NPM. 0671010007

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA**

2010

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI PENCEMARAN AIR PADA PDAM KOTA SURABAYA

**(Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang
terjadi di kali Surabaya)**

Disusun oleh :

JEFFRY HASIROLAN SILALAH
NPM. 0671010007

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP: 19601212 198803 1 001

Mas Anienda Tien. F., SH., M.H.
NPT: 3 7709 07 0223

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI PENCEMARAN AIR PADA PDAM KOTA SURABAYA

**(Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang terjadi di kali
Surabaya)**

Oleh:

JEFFRY HASI HOLAN SILALAH

0671010007

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur
Pada Tanggal 9 November 2010**

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP: 19601212 198803 1 001

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.

NIP. 19620625 199103 1 001

2.

Pembimbing Pendamping

Subani, S.H., M.Si.

19510504 198303 1 0001

3.

Mas Anienda Tien. F., S.H., M.H.

NPT: 3 7709 07 0223

Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP: 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.

NIP. 19620625 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamin, atas segala puji syukur bagi Allah SWT, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dengan perjuangan yang sangat berat. Karena itu dengan melihat realita yang ada, penulis merasa mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
2. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa timur.
3. Bapak Subani, S.H, M.Si, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
4. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum dan Ibu Mas Anienda Tien. F.,SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing dan Tim Penguji Skripsi.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
6. Orangtuaku Ibu Musrifah yang dengan gigih membimbing dan membesarkan saya beserta seluruh keluargaku.
7. R. Gatot Soebroto, SE. SH. MH selaku nara sumber dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya atas bantuan, fasilitas, dan kerjasamanya.

8. Untuk calon pendamping hidupku dan juga Pujaan hatiku Voni Soraya, atas saran dan kritik beserta selalu mendukung dengan doanya yang tulus.
9. Terakhir, untuk Sobat-sobat dekatku, atas perhatian, waktu, dan kerjasamanya selama ini.

Terakhir kepada kolega, handai taulan dan Rekananku yang sangat membantu hingga selesainya penulisan Skripsi ini. Dukungan serta bantuan kalian sangat besar dan akan kukenang sepanjang masa.

Surabaya, November 2010

Penulis

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Jeffry Hasiholan Silalahi

NIM : 0671010007

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 03 April 1988

Program Studi : strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
NEGOSIASI PENCEMARAN AIR PADA PDAM KOTA
SURABAYA**

(Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang terjadi di Kali
Surabaya)

Penulisan Skripsi ini secara khusus membahas penegakan hukum lingkungan dan upaya penyelesaian sengketa terhadap kasus pencemaran limbah tetes tebu PG. Ngadirejo Kediri di Kali Surabaya yang mengakibatkan tercemarnya media lingkungan disepanjang sungai Brantas dan berdampak terhadap lahan pertanian yang memanfaatkan sungai tersebut khususnya PDAM Kota Surabaya yang dalam pengolahan air minum menggunakan sungai brantas sebagai air baku. Hakikat dasar dari penulisan ini untuk mengungkap penyelesaian sengketa kasus pencemaran limbah tetes tebu PG. Ngadirejo Kediri di Kali Surabaya serta kronologis kejadiannya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini, Pertama adalah melalui metode penelitian hukum normative untuk meneliti upaya penyelesaian sengketa lingkungan tersebut. Kedua, metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dipakai untuk menggali data-data sekunder dari studi kepustakaan untuk memperoleh kerangka pemikiran teoritis yang relevan dengan masalah penelitian tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Teknik analisis dilakukan secara deskriptif dan prespektif dengan tujuan untuk dapat mengungkap realita yang terjadi di lapangan sesuai dengan harapan. Data-data atau informasi yang telah dihimpun melalui studi kepustakaan untuk kemudian diolah, diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dari data-data tersebut akan ditarik suatu kesimpulan.

Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun kasus pencemaran limbah tetes tebu PG. Ngadirejo Kediri di Kali Surabaya dalam penyelesaiannya menggunakan prinsip-prinsip negosiasi (salah satu dari ADR) tetapi penyelesaian tersebut masih belum dapat menghentikan pencemaran yang rusak terhadap media lingkungan yang rusak meskipun sudah digelontor oleh PT. Jasa Tirta.

Masih ada upaya hukum yang lain untuk menjerat pelaku pencemaran melalui instrumen hukum lingkungan administrasi yaitu Baku Mutu Lingkungan,

AMDAL dan izin lingkungan dimana sanksi administrasi dari Pemerintah Daerah yaitu berupa pencabutan ijin lingkungan sangat kurang tegas dilaksanakan dengan pertimbangan masalah sosial dan lemah dalam pengawasan pembuangan limbah industri di sungai meskipun ada dalam prakteknya penyelesaian ini sangat sarat dengan kolusi.

Dalam UUPLH sudah tertuang gugatan secara perdata tetapi ini masih sulit diterapkan karena masih awamnya korban pencemaran terhadap aspek hukum yang ada dan dalam praktek pengadilanpun Pihak pencemar selalu dibebaskan karena tidak ada cukup bukti (asas ini dubio pro Reo). Selain belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Pengujian Sampel maka sanksi pidana juga sangat sulit diterapkan karena pembuktian materiil/pengujian di Laboratorium dari sengketa lingkungan yang tidak standart dan pembuktiannya dipersidangan masih dibutuhkan saksi ahli dari berbagai disiplin keilmuan.

Kata kunci : Alternatif penyelesaian sengketa, Negosiasi, Pencemaran Air

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian	19
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II ALASAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA MENGGUNAKAN METODE NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN AIR KALI SURABAYA DENGAN PABRIK GULA NGADIREJO KEDIRI	25
2.1. Kronologis kejadian penemaran kali Surabaya.....	26
2.2. Kerugian PDAM Kota Surabaya.....	29
2.2.1. Tambahan Biaya Akibat Penambahan bahan Kimia	30
2.2.2. Tambahan Biaya Untuk Penujian Pipi (Flushing)	30
2.2.3. Kerugian Akibat Air Produksi Tidak Terjual	31
2.2.4. Kerugian Pelanggan Selama Terjadi Pencemaran.....	32
2.3. Tahapan Negosiasi antara Pabrik Gula Ngadirejo dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.....	32
2.3.1. Tahap Perencanaan	32
2.3.2. Tahap Implementasi	33
2.3.3. Tahap Peninjauan Kembali.....	38
2.4. Alasan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya Menggunakan Metode Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Air Kali Surabaya Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri	39
2.4.1. Alasan Yuridis	39
2.4.2. Alasan Ekonomis	40
BAB III HAMBATAN PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN AIR MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION.....	42
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran-Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Jeffry Hasiholan Silalahi
Tempat/Tgl Lahir : 03 April 1988
NPM : 0671010007
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jalan Tambaksari 2 no.4 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **“ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NEGOSIASI PENCEMARAN AIR PADA PDAM KOTA SURABAYA, (Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang terjadi di kali Surabaya)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya Jeffry Hasiholan Silalahi (selaku saya sendiri), yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumannya.

Mengetahui

KapProdi

Surabaya, 09 November 2010

Penulis,

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1.Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan peraturan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, Negosiator hukum bagi seluruh masyarakat. Secara nasional Negosiator hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

Namun sebenarnya permasalahan itu telah ada sejak manusia ada di bumi. Bahkan apabila kita meninjaunya lebih luas daripada segi manusia, permasalahan itu ada sejak bumi ini tercipta.

Secara Yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yang sejak tanggal 19 September 1997 telah diundangkan. Undang-Uundang baru sebagai penggantinya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks dan

dilematis. Dikatakan kompleks karena permasalahannya menyangkut berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti kimia umum, kimia teknik, teknik industri, biologi, geologi, pertanian dan lain-lain. Dikatakan dilematis karena jika penanganannya tidak hati-hati dan seksama, artinya hanya mengedepankan aspek penegakan hukum semata, maka akan menimbulkan permasalahan baru seperti masalah perekonomian, sosial dan lain-lain. Di sisi lain manusia mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1).

Namun sebenarnya permasalahan itu telah ada sejak manusia ada di bumi. Bahkan apabila kita meninjaunya lebih luas daripada segi manusia, permasalahan itu ada sejak bumi ini tercipta.¹

Sumber masalah lingkungan hidup yang menimbulkan permasalahan lingkungan hidup ialah manusia, yang dalam aktifitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan.

Kalaupun dapat, tentu harus melalui pengolahan terlebih dahulu, yang tentu saja ada biaya pengolahan yang sangat besar, tergantung kepada nilai pencemarannya.

Yang paling mengerikan adalah akibat pencemaran, baik yang langsung mengenai air ataupun tidak. Pencemaran yang berasal dari rumah tanggadalam hal ini pada umumnya dalam bentuk pencemar organik, atau yang berasal dari pabrik, industri serta kegiatan lainnya (umumnya dalam bentuk pencemar non organik) kalau mengenai badan air (sungai, danau dan sebagainya) akan menyebabkan

¹ Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jkt, 2001, hal. 2

penurunan terhadap kualitas dan kesehatan air. Akibat secara langsung, sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan rumah tangga. Kalaupun dapat, tentu harus melalui pengolahan terlebih dahulu, yang tentu saja ada biaya pengolahan yang sangat besar, tergantung kepada nilai pencemarannya.²

Permasalahan lingkungan berkembang sedemikian cepat, sehingga perlu segera direalisasikan pengembangan dan penetapan peraturan yang relevan dengan perkembangan permasalahan lingkungan. Dari segi kesadaran masyarakat, masih terdapat kesenjangan antara wawasan ekonomi dan wawasan lingkungan, sehingga lingkungan akan senantiasa menjadi korban manusia yang berorientasi keuntungan finansial tanpa memperhitungkan dampak pada lingkungan.

Hukum Administrasi Negara (HAN) akan tampak berkaitan dengan peran pemerintah untuk memberikan perijinan pendirian usaha/industri dan melakukan langkah penyelamatan lingkungan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan dalam perijinan dilanggar.³

Sedangkan penegakan hukum pidana dibatasi pada pencemaran air kali atau sungai yang disebabkan oleh bahan kimia atau buangan limbah dari perusahaan-perusahaan industri.

² Suriawiria, Unus, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Alumni, Bdg, 1996, h.13.

³ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah Univrsity Press, surakarta, 2000, Hal. 36-37.

Namun demikian, tidak dapat pula disangkal bahwa terdapat banyak ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada peraturan-peraturan Hukum Lingkungan yang melarang dilakukannya perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya : larangan untuk melakukan suatu usaha tanpa adanya ijin yang disyaratkan, atau juga adanya perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan faktual tertentu yang bertentangan atau melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu perijinan, perbuatan-perbuatan mana dapat merupakan sumber timbulnya kerugian bagi seseorang atau bahkan pada masyarakat.

Dengan demikian maka akan timbul tuntutan ganti rugi dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara yang diajukan melalui proses gugatan ke Pengadilan Negeri, di mana kaidah-kaidah Hukum Perdata akan diterapkan sekalipun dengan beberapa kekhususan sesuai dengan sifatnya yang istimewa dalam setiap problema.

Dari segi sarana pengendalian (Instansi, aparat penegak hukum) pencemaran, secara finansial terhitung sangat mahal, sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalah secara ekonomi, sosial atau teknis manual dapat diterapkan sesuai kebutuhan. Sehingga dalam penyelesaian sengketa secara hukum di luar pengadilan tercapai suatu perdamaian, sesuai dengan dasar hukum pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian.

Dalam praktek sengketa pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan hidup, dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau Litigasi menurut Pasal 34-39 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan melalui jalur diluar pengadilan atau Non Litigasi menurut Pasal 30-33 Undang-Undang Lingkungan

Hidup, sedangkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, dapat dilakukan melalui sarana Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Penyelesaian di luar pengadilan, dapat dilakukan secara Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Penulisan proposal skripsi ini secara khusus membahas penegakan hukum lingkungan dan upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode Negosiasi terhadap kasus pencemaran limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri di Kali Surabaya yang mengakibatkan tercemarnya media lingkungan di sepanjang sungai Brantas dan berdampak terhadap masyarakat yang memanfaatkan sungai tersebut khususnya Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang dalam pengolahan air minum menggunakan sungai brantas sebagai air baku.

Hakikat dasar dari penggunaan metode Negosiasi dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses penyelesaian sengketa kasus pencemaran limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri di Kali Surabaya. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi Pencemaran Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya (Studi Kasus Limbah Tetes Tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri)”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa kasus pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang diakibatkan meluapnya pengolahan limbah tetes tebu Pabrik Gula Ngadirejo Kediri, lebih efektif menggunakan metode Negosiasi?
2. Apakah hambatan metode Negosiasi dalam penyelesaian sengketa pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Alternatif Penyelesaian Sengketa mana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pencemaran air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya oleh Pabrik Gula Ngadirejo Kediri.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa pencemaran air yang menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis :
 - a. Penelitian memberikan gambaran yang jelas sejauh mana kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran air dengan perkembangan industri yang terus meningkat.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, agar sumber alam tetap lestari.
- c. Dapat memberikan masukan-masukan bagi para industriawan, bagaimana industri yang ada harus selalu berwawasan lingkungan dan menghasilkan suatu produk yang bersih lingkungan.

2. Kegunaan Teoritis :

- a. Dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang upaya penegakan hukum terhadap dampak pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Dapat memberi sumbangan pikiran bagi Ilmu Pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Hukum Lingkungan secara keperdataan yang berkaitan dengan pencemaran air.

1.5. Kajian Pustaka

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan/ancaman

sarana administrasi, keperdataan dan kepidanaan.

1. Aspek Hukum Administrasi

Pasal 25-27 UUP LH memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menjatuhkan sanksi administratif, yang dinamakan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan :

- a. Untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran;
- b. Untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran;
- c. Untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan.
- d. Atas beban dan biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2. Aspek Hukum Perdata

Subyek hukum yang merasa dirugikan sebagai akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) pasal 1365 KUHP erdata di bidang lingkungan hidup, dapat melakukan prosedur penyelesaian sengketa berupa aksi gugatan perdata (non litigasi) di luar pengadilan secara musyawarah (Pasal 31-33 UUP LH) atau melalui jalur litigasi di Pengadilan (pasal 34-39 UUP LH). Begitu juga dengan harapan terciptanya suatu perdamaian sesuai dengan pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHP erdata tentang perdamaian.

3. Aspek Hukum Pidana

Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana pencemaran diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 UUP LH pasal 41 – 48, sebagai berikut :

- a. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 dan 42 yang merupakan delik materiil, artinya harus dibuktikan unsur pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah akibat dari perbuatan pelaku pencemar (hubungan kausal). Hal ini sangat sulit karena baku mutu ambien sungai yang melampaui ambang batasnya dapat saja diakibatkan oleh limbah industri, limbah domestik dan limbah pertanian/pestisida.
- b. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 43 dan 44 merupakan delik formal, artinya cukup dibuktikan bahwa usaha dan atau kegiatan pelaku pencemar limbahnya melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh baku mutu ambien, yang pengambilan sampelnya dapat dilakukan di tempat penggelontoran limbah.
- c. Tanggung jawab korporasi, maksudnya terhadap badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana denda. Hal ini diatur dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Adanya sanksi pidana yang tidak dijumpai dalam KUHPidana yang dinamakan tindakan tata tertib, berupa 6 macam (pasal 47 UUPH), yaitu :
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
 2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan ;
 3. Perbaikan akibat tindak pidana ;
 4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak ;
 5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak ;
 6. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun.
- e. Seluruh tindak pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang

Pengelolaan Lingkungan Hidup dikualifikasikan sebagai kejahatan (pasal 48).

4. Gugatan Class Action

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dilakukan dengan dua cara, antara lain:

1. oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
2. sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama atau Class Action.

Gugatan secara class action atau gugatan kelompok telah lama dikenal dan berlaku dinegara-negara yang menganut sistem hukum common law, seperti Inggris dan Negara bekas jajahan. Sedangkan di Indonesia gugatan ini pertama kali diperkenalkan melalui UU No.23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan dalam antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Gugatan perwakilan kelompok di atur dalam Pasal 37 UU No.23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi :

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi

perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian dengan cara non litigasi di atur dalam pasal 34 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Dalam kepustakaan Hukum Lingkungan, Alternatif Penyelesaian Sengketa mendeskripsikan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian lingkungan selain proses litigasi, antara lain : negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang dapat dibedakan dari arti dan fungsinya serta dalam beberapa hal oleh akibat hukumnya.

Bentuk-bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut :

1. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para pihak untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang.
3. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.
4. Arbitrasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. mempunyai wewenang untuk memutuskan.

Keempat bentuk penyelesaian sengketa di atas dilakukan di luar Pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung yang mana yang lebih disukai dan dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa pencemaran air di kali Surabaya antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri, masing-masing pihak bersepakat

menggunakan jalur Negosiasi.

Dalam setiap proses Negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandang Negosiatornya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi.

Pengertian Negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang Negosiator siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Bagi pihak pembeli, negosiasi merupakan seni membeli sampanye Prancis yang berkualitas baik dengan harga sebotol bir. Sementara bagi penjual, negosiasi merupakan seni menjual mobil mewah kepada pembeli yang berpura-pura hanya bisa membeli mobil kelas dua.

Pada dasarnya bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang Negosiator mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama.

Negosiasi juga biasa dikatakan sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi,

mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama yang terlibat dalam negosiasi.

Negosiasi adalah suatu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, dan merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi, serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.⁴

Kemudian Alan Fowler menjelaskan Negosiasi sebagai proses interaksi, di mana dua orang atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama.⁵

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 1, Tentang Arbitrase menjelaskan Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Keputusan Negosiasi secara yuridis berupa suatu perjanjian

⁴ Garry Goodpaster, Panduan negosiasi dan Mediasi, 1999, halaman 1.

⁵ Fowler, Alan, effective negotiation, diterj. Kentjanawati Tamiran, Keterampilan Bernegosiasi, Binarupa Aksara, Jakarta 1993, halaman 6.

kesepakatan bersama diantara para pihak yang melakukan Negosiasi secara kontraktual sesuai Pasal 1338 KUHPerdota.

Negosiasi adalah sebuah bentuk pertemuan antara dua belah pihak yang bertujuan untuk menghasilkan suatu persetujuan bersama menggunakan langkah-langkah negosiasi seperti strategi, taktik, dan persyaratan.

Negosiasi juga merupakan suatu proses dimana dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi.

Dalam negosiasi terjadi proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Negosiasi juga menjadi salah satu jalan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, membuat beberapa perjanjian dan terkadang tidak, kadang-kadang kita juga mencapai lebih banyak daripada yang diantisipasi, pada kesempatan lain tidak.

Manusia dikatakan memiliki kemampuan belajar bernegosiasi lebih cepat daripada belajar untuk berbicara, bayi sangat cepat belajar untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan menangis. Beberapa dari kita, terus menggunakan taktik ini atau bila ditemukan cara yang efektif akan terus digunakan sampai dewasa. Ada banyak literatur tentang negosiasi, namun saat berusaha mengembangkan suatu kemampuan, bahan ditulis hanya dapat menyiapkan Negosiator nya saja.

Dalam hal ini terdapat bermacam-macam negosiasi yang dihadapi oleh para pihak yang bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa pencemaran air, diantaranya sebagai berikut :

1. Negosiasi kooperatif adalah jenis negosiasi dimana konflik dapat diminimalkan dan seluruh gagasan bertujuan untuk mencapai solusi dimana semua pihak mendapatkan manfaat.

Cakupan negosiasi kooperatif adalah :

- a. Membuka perundingan dengan mengutarakan sebanyak mungkin informasi dimana solusi bisa dibuat dan diterima kedua belah pihak.
- b. Mempertimbangkan sejumlah alternatif dari permasalahan.
- c. Fleksibel.
- d. Membantu pihak lawan untuk menyampaikan gagasan mereka tentang berbagai solusi yang mungkin.
- e. Persetujuan saling menguntungkan (win-win solution) dimana pada proses negosiasi kedua belah pihak merasakan akhir yang memuaskan dan menyepakati persetujuan yang tepat. Karena negosiasi merupakan proses memberi dan menerima, apabila kedua belah pihak menerima hal ini maka pendekatan saling menguntungkan lebih memungkinkan untuk kedua belah pihak.

2. Negosiasi kompetitif adalah jenis negosiasi dimana suasana negosiasi tidak ramah dan masing-masing pihak berusaha sedapatnya untuk mendapatkan tawaran terbaik bagi dirinya sendiri.

Cakupan negosiasi kompetitif adalah :

- a. Seni dalam menyatakan penawaran pembuka.
- b. Keterampilan untuk mendinginkan situasi konflik dan keterampilan bersikap tegas untuk menjaga posisi pengendali.

Faktor yang paling berpengaruh dalam negosiasi adalah filosofi yang menginformasikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat. Ini adalah kesepakatan dasar kita bahwa "semua orang menang", filsafat ini harus mendasari setiap negosiasi. Kunci untuk mengembangkan filsafat supaya "semua orang menang" adalah mempertimbangkan setiap aspek negosiasi dari sudut pandang Negosiator pada pihak lain dan pihak kita. Setelah Negosiator memahami filosofi, selanjutnya Negosiator memerlukan metode untuk mempraktekannya.

Terdapat empat dasar keterampilan untuk bernegosiasi, antara lain :

1. Pengaruh, penghargaan terhadap faktor pengaruh yang berada dalam setiap situasi, ditambah kemampuan untuk mempengaruhi (ketika itu giliran Negosiator dan mengatasinya atau ketika melawan Negosiator).
2. Informasi, kemampuan untuk menggali lebih dalam dan mengevaluasi informasi yang berguna mengenai sisi lain, sementara koreksi informasi tentang sisi Negosiator, tapi Negosiator tidak mengungkapkannya.
3. Kredibilitas, kemampuan untuk membuat orang-orang di sisi lain percaya Negosiator maksud apa yang Negosiator katakan, serta untuk menilai apakah atau tidak mereka menggertak.
4. Penilaian, kemampuan untuk menyerang dengan seimbang dan tepat antara meraih keuntungan dan kompromi, pada dasarnya serta dalam

gaya teknik negosiasi Negosiator.

Alternatif penyelesaian sengketa dengan jalan Negosiasi tersebut diatas sangat efektif dalam menyelesaikan kasus pencemaran air, tetapi ada beberapa hambatan dalam negosiasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan bahkan tidak juga bisa dipecahkan secara efisien dengan resolusi yang fair. Konflik masih tetap berlangsung meskipun banyak kemungkinan adanya resolusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang bersangkutan. bahwa ketidakadanya resolusi, secara substansial akan terus berkembang dan biaya penyelesaiannya tidak bisa dihindari oleh semua pihak.

2. Hambatan Strategis.

Negosiasi juga meliputi distribusi keuntungan, kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan solusi yang lebih baik pada waktu yang sama. Pemberian kue yang lebih besar kepada salah satu pihak berarti menguntungkan pihak tersebut, sedangkan yang menerima irisan lebih kecil merasa dirugikan.

3. Hambatan Kognitif

Rintangan ketiga disebabkan oleh pikiran yang memproses informasi, resiko yang dihadapi, ketidakpastian membuat kesimpulan, dan keputusan.

Terdapat beberapa bentuk mekanisme penyelesaian lingkungan selain proses litigasi, antara lain : negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari

fakta dan arbitrase yang dapat dibedakan dari arti dan fungsinya serta dalam beberapa hal oleh akibat hukumnya.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap Negosiasi, yaitu :

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa;
2. untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain.

Para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik.⁶

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa lingkungan melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak yang bersangkutan.⁷

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang ditempuh oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya selaku korban pencemaran adalah negosiasi.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian

⁶ Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, halaman 14.

⁷ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 39.

dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan di lapangan kemudian di analisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Data

Data yang digunakan adalah :

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan dengan melakukan survai langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan R. Gatot Soebroto, S.H. Bagian Hukum di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang merupakan salah satu pelaku di dalam Negosiasi tersebut dan diperoleh data hasil negosiasi antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri sebagaimana dalam lampiran skripsi ini.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis, yang terdiri dari :
 - a. Sumber Bahan Hukum Primer

bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dari :

 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase*.
 - b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar,

yurisprudensi dan hasil penelitian para pakar, yaitu :

1. Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2000.
2. Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2001.
3. Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
4. Lotulung, Paulus Efendi, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
5. Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
6. Suriawiria, Unus, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Alumni, Bandung, 1996.
7. Soemartono, R. M. Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
9. Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
10. Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus-kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data digunakan wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.

Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah Analisa Deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan.

Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala, dengan cara menginventaris, mengumpulkan dan menganalisa studi kepustakaan terhadap hasil penelitian di lapangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab utama adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan waktu penelitian.

Bab II : ALASAN PDAM KOTA SURABAYA MENGGUNAKAN METODE NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN AIR DENGAN PABRIK GULA NGADIREJO KEDIRI.

Dalam bab ini, dilakukan penguraian tentang alasan PDAM Kota Surabaya memilih metode Negosiasi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran air melubernya limbah tetes tebu dari Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang di derita Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

Bab III : HAMBATAN METODE NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN PENCEMARAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA DENGAN PABRIK GULA NGADIREJO KEDIRI.

Dalam bab ini, peneliti membahas hambatan dan strategi penyelesaian sengketa antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dan Pabrik Gula Ngadirejo Kediri yang dilakukan di luar pengadilan dengan Metode Negosiasi.

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, berisi kesimpulan berisi hasil akhir dari analisis hukum serta beberapa saran yang dapat diterapkan pada alternatif penyelesaian sengketa lingkungan pencemaran air di Indonesia.